



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 311);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 24 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula Rp. 5.092.599.934.103,-

b. Bertambah Rp. 162.644.219.341,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 5.255.244.153.444,-

2. Belanja :

a. Semula Rp. 5.720.099.162.102,-

b. Bertambah Rp. 235.228.386.088,-

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 5.955.327.548.190,-

Defisit setelah perubahan (Rp. 700.083.394.746,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 643.971.896.469,-

2) Bertambah Rp. 161.447.496.469,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 805.419.392.938,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 16.472.668.470,-

2) Bertambah Rp. 2.510.238.900,-Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 18.982.907.370,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 786.436.485.568,-

Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 86.353.090.822,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 2.570.793.944.555,-

2) Bertambah Rp. 86.315.282.040,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 2.657.109.226.595,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.523.841.223.096,-

2) Bertambah Rp. 43.208.640.750,-

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.567.049.863.846,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 997.964.766.452,-

2) Bertambah Rp. 33.120.296.551,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 1.031.085.063.003,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 2.098.292.666.000,-

2) Bertambah Rp. 20.000.000.000,-

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 2.118.292.666.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 221.303.062.247,-

2) Bertambah Rp. 13.893.739.606,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 235.196.801.853,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 92.461.561.125,-

2) Bertambah Rp. 19.505.117.211,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 111.966.678.336,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 158.736.655.183,-

2) Bertambah Rp. 32.916.425.223,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 191.653.080.406,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 295.634.740.096,-

2) Bertambah Rp. 43.208.640.750,-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 338.843.380.846,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 1.160.025.693.000,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 1.160.025.693.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	68.180.790.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,-

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 68.180.790.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,-

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,-

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,-

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,-

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp.	661.107.493.688,-
2) Bertambah	Rp.	3.043.091.964,-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 664.150.585.652,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	334.460.943.736,-
2) Bertambah	Rp.	25.450.941.264,-

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 359.911.885.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	6.173.385.000,-

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 6.173.385.000,-

f. Dana bagi hasil lainnya

1) Semula Rp. 2.396.329.028,-

2) (berkurang) (Rp. 1.639.034.677,-)

Jumlah Dana bagi hasil lainnya Rp. 757.294.351,-

g. Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 91.913.000,-

Jumlah Dana bagi hasil lainnya Rp. 91.913.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.961.927.690.732,-

2) Bertambah Rp. 101.319.410.190,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 2.063.247.100.922,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 3.758.171.471.370,-

2) Bertambah Rp. 133.908.975.898,-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 3.892.080.447.268,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 1.708.378.288.132,-

2) Bertambah Rp. 50.092.760.000,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.758.471.048.132,-

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 1.226.354.437,-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 1.226.354.437,-

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,-

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 235.325.228.371,-

2) Bertambah Rp. 49.585.387.023,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 284.910.615.394,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 1.651.000.000,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-Jumlah belanja bantuan sosial setelah
perubahan Rp. 1.651.000.000,-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 4.673.174.229,-

2) Bertambah Rp. 414.908.730,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 5.088.082.959,-

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 1.900.000.000,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
perubahan Rp. 1.900.000.000,-

h. Belanja tidak Terduga

1) Semula Rp. 10.000.000.000,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan Rp. 10.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 418.044.632.488,-

2) Bertambah Rp. 32.307.047.843,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 450.351.680.331,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 1.608.107.422.736,-

2) Bertambah Rp. 86.264.584.847,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 1.694.372.007.583,-

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 1.732.019.416.146,-

2) Bertambah Rp. 15.337.343.208,-

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1.747.356.759.354,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 643.971.896.469,-

2) Bertambah Rp. 161.447.496.469,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 805.419.392.938,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 16.472.668.470,-

2) Bertambah Rp. 2.510.238.900,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 18.982.907.370,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 643.971.896.469,-

2) Bertambah Rp. 161.447.496.469,-

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 805.419.392.938,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah

1) Semula	Rp.	16.472.668.470,-
2) Bertambah	Rp.	<u>2.500.000.000,-</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 18.972.668.470,-

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	<u>10.238.900,-</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 10.238.900,-

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran I A : Urusan Kas dan Perhitungan;

3. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
4. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT
DAERAH
MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.
Permana
NIP. 19730504 199602 2 001

